

TESIS

STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI PENENUN DALAM Mendukung PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI PADA SENTRA TENUN IKAT GUNUNG MAKO, DESA ALOR BESAR, KECAMATAN ALOR BARAT LAUT, KABUPATEN ALOR, PROVINSI NTT

Disusun oleh :

N A M A : GABRIEL LOBANG TANG
N P M : 2042021004
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr. A.P).



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
2023**

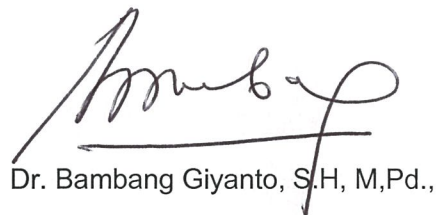
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023

LEMBARAN PERSETUJUAN TESIS

Nama : Gabriel Lobang Tang
NPM : 2042021004
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Peningkatan Kompetensi Penenun dalam Mendukung Pembangunan Sektor Industri pada Sentra Tenun Ikat Gunung Mako, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *The Strategies of Weavigers Competency Increasing in Supporting Industrial Sector Development on The Centre Of Gunung Mako Ikat Weaving, Alor Besar Village, Alor Barat Laut District, Alor Regency, East Nusa Tenggara Province.*

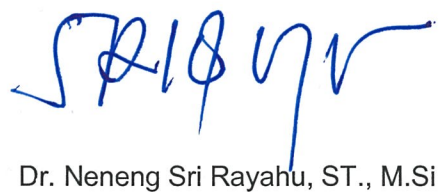
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis :

Pembimbing I



Dr. Bambang Giyanto, S.H, M,Pd.,

Pembimbing II



Dr. Neneng Sri Rayahu, ST., M.Si

Lembar Pengesahan

NAMA : GABRIEL LOBANG TANG
NPM : 2042021004
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI PENENUN
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN SEKTOR
INDUSTRI PADA SENTRA TENUN IKAT GUNUNG
MAKO, DESA ALOR BESAR, KECAMATAN ALOR
BARAT LAUT, KABUPATEN ALOR, PROVINSI NTT.

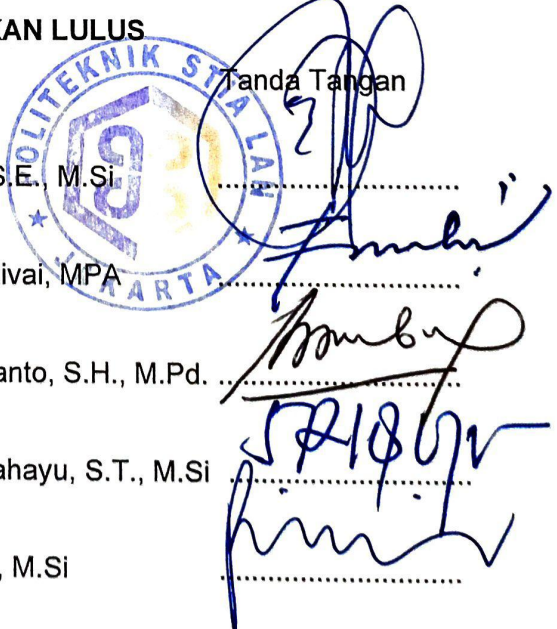
Telah mempertahankan Tesis di Hadapan Penguji Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Juli 2023
Pukul : 13.00-14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

Tim Penguji Nama Tanda Tangan

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si
Sekretaris : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA
Anggota/ Pembimbing 1 : Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd.
Anggota/ Pembimbing 2 : Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si
Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : GABRIEL LOBANG TANG
NPM : 2042021004
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir yang telah saya buat ini dengan judul "STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI PENENUN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI PADA SENTRA TENUN IKAT GUNUNG MAKO, DESA ALOR BESAR, KECAMATAN ALOR BARAT LAUT, KABUPATEN ALOR, PROVINSI NTT", merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir merupakan hasil plagiat atau penjiplakan teradap karya karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan/atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat dan tidak dalam paksaan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Yang memberikan Pernyataan,



Gabriel Lobang Tang

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dihaturkan ke Hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena hanya karena kemurahan-Nya, Tesis dengan judul: “Strategi Peningkatan Kompetensi Penenun dalam Mendukung Sektor Industri pada Sentra Tenun Ikat Gunung Mako, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor,” dapat diselesaikan, sehingga dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Master Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP) pada Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Keberhasilan ini bukan merupakan usaha pribadi semata, namun penulis merasakan secara langsung bagaimana peran serta Kedua Dosen Pembimbing, masing-masing: **Pertama, Bapak Dr. Bambang Giyanto, SH., M.Pd**, yang dengan rela dan kesabaran kebapaannya rela membimbing dalam proses hingga berakhirnya penulisan ini. Untuk itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyatakan rasa terima kasih atas pengorbanan dan jasa baik tersebut; **Kedua, Ibu Dr. Neneng Sri Rayahu, ST.,M.Si**, yang dengan caranya tersendiri selaku Dosen Pembimbing dan selaku salah seorang Wakil Direktur serta terkadang berperan sebagai seorang ibu yang penuh kesabaran terus bertanya dan memotivasi penulis untuk mengikuti arah bimbingan dan aturan kampus. Untuk itu, tak ada sesuatu yang paling berharga untuk diberikan atas jasa budi baik dari Bunda, selain ucapan terima kasih tak terhingga.

Ucapan Terima Kasih pula kepada segenap lembaga pendidikan beserta orang-orang yang berperan di dalamnya, antara lain:

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah membuka Lembaga Pendidikan Politeknik STIA LAN Jakarta, sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan Strata Dua (S2) hingga selesai.
2. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan Program Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta;
3. Dr. Edy Sutrisno, M.Si., selaku Dosen Penguji dan Pembahas yang juga telah memberikan banyak saran dan motivasi untuk revisi;
4. Dr. Firman Hadi Rivai, MPA, selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran untuk perbaikan tesis ke arah yang lebih berkualitas dan praktis serta inovatif;
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta ilmu pengetahuan selama menjalankan studi pada Program Magister Administrasi Pembangunan Negara (APN) Politeknik STIA LAN Jakarta;
6. Seluruh Jajaran/ Staf Program Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta atas layanan informasi, layanan perpustakaan dan dukungan dari awal hingga akhir proses menempuh Pendidikan Program Magister APN Politeknik STIA LAN Jakarta;

7. Pemerintah Kabupaten Alor melalui Bupati Alor, Drs. Amon Djobo yang telah memberikan Tugas Belajar kepada Saya untuk melanjutkan studi ke Jenjang Magister (S2) pada Poltek STIA LAN Jakarta pada 2020;
8. Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor yang telah mengusulkan kepada Bupati Alor, sekaligus menjaga asset budaya Rumah Adat Alor, Anjungan NTT, TMII Jakarta Timur;
9. Bagian Humas Setda Alor yang merelakan stafnya untuk meningkatkan kompetensi guna memperkuat Kapasitas SDM pada Jajaran Birokrasi Kabupaten Alor;
10. Para Nara Sumber, terutama *Key Informant/* Informan Kunci, baik di Lokasi Penelitian di Dua Pulau, yaitu: di Pulau Alor dan Ternate; Kepala Desa Alor Besar dan Kepala Desa Ternate Selatan serta para informan lainnya dan Key Informan dari Kalabahi, masing-masing, yaitu: Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Alor dan Ibu Ketua Asosiasi Pengrajin Tenun Ikatat Alor (APTIA) Kabupaten Alor serta Ibu Ketua Dekrasda Kabupaten Alor yang telah berbagi waktu buat diwawancarai;
11. Orangtua tersayang : Bapak Bernardus Lobang Tang (104 tahun pada 20 Agustus 2023) dan Ibu Lusia Lobang Maroo (Almarhuma) serta para saudara dan saudari yang dengan caranya tersendiri rela membantu.
12. Keluarga Saya, teristimewa, istri tercinta Kornalia Maiata, S.Sos yang dengan penuh suka cita dan pengorbanan memerhatikan serta mengikuti proses panjang dan melelahkan ini. Pula anak-anakku tersayang yang dengan sabar dan rela kurang diperhatikan dalam tugas ini: Fr. Brilian Lobang Tang, Kembangku, Camelia dan Carmelita Lobang Tang, FX Christian Lobang Tang, Agnes Aloris Caritas Lobang Tang dan Abraham Anando M. Lobang Tang. Semoga menjadi motivasi untuk meraih mimpi yang lebih tinggi;
13. Teman-teman Angkatan tahun 2020 atas diskusi bersama, saling mendukung dan mendoakan satu dengan yang lain;
14. Sahabat-sahabatku di Anjungan NTT dan Kantor Badan Penghubung NTT Jakarta yang menerima penulis dan terlibat dalam dinamika kegiatan membangun daerah Provinsi NTT dan Kabupaten Alor, termasuk sobat-sobat di Bandung, Forum Timor Besar Lais Manekat (FTBLM), Lembang, Jawa Barat;
15. Teman-temanku di Kabupaten Alor dan Provinsi NTT yang selalu berdoa dan bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab ini.

Jakarta, 17 Agustus 2023

Gabriel Lobang Tang

MOTO

FINIS CORONAT OPUS

Akhir memahkotai Pekerjaan

URIP IKU URUP

Hidup Manusia harus menjadi cahaya bagi sesama

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI PENENUN DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI PADA SENTRA TENUN IKAT GUNUNG MAKO,
DESA ALOR BESAR, KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR, NTT

Gabriel Lobang Tang, Bambang Giyanto, Neneng Sri Rahayu

gabriellobangtang@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan merupakan sebuah upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan. Upaya itu terus dilakukan dengan berbagai macam cara, metode dan strategi. Strategi yang jitu akan mempercepat pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pembangunan terdiri dari berbagai sektor kehidupan dan salah satu sector adalah industri. Pembangunan Sektor Industri memerlukan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan SDM tidak terlepas dari kompetensi. Tujuan Penelitian adalah menganalisis strategi yang tepat dalam hal kompetensi penenun agar dapat meningkatkan hasil produksi tenun ikat di Kabupaten Alor. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif menggunakan Teori Kompetensi *Spencer and Spencer (1993)* dan Pembangunan Daerah dengan didukung oleh Analisis SWOT untuk menentukan strategi yang tepat.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa *Aspek Motif*, bahwa: *Sub Aspek Motivasi* dan *Semangat Kerja* kuat berasal dari pemilik dan badan pengurus inti. Sementara, *Sub Aspek Umpun Balik* belum dimanfaatkan. *Aspek Traits* masih kurang terutama pada *Sub Aspek Sikap Pelayanan*. Sedangkan, *Sub Aspek Ketahanan Fisik* baik. *Aspek Konsep Diri* sudah ada Rasa Percaya Diri dari individu maupun kelompok dan *Aspek Pengetahuan Formal* masih kurang sekali, sementara *Aspek Pendidikan Nonformal* cukup dan *Informal* paling tinggi. *Aspek Ketrampilan* baik dengan sudah memiliki kekhasan atau keunikan yang sulit ditiru. Strategi yang diterapkan terdiri dari strategi jangka pendek dengan mengadakan konsolidasi internal melalui kegiatan latihan proses menenun secara rutin, jangka sedang dengan mengadakan kerjasama dengan pihak terkait (*stake holders*) dan jangka panjang dengan mengirim anggota untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal..

Kata Kunci : Strategi; Kompetensi Penenun; Pembangunan Daerah; Sektor Industri; Tenun Ikat.

The Strategies of Weavigers Competency Increasing in Supporting Industrial Sector Development on The Centre of Gunung Mako Ikat Weaving, Alor Besar Village, Alor Barat Laut District, Alor Regency, East Nusa Tenggara Province

ABSTRACT

Development is a human effort to achieve happiness. These efforts continue to be carried out in various ways, methods and strategies. Various ways, methods and appropriate strategies will accelerate the achievement of the goals that have been planned. The Development Program is divided into 17 Sectors and one of them is the Industrial Sector. Development of the Industrial Sector requires Human Resource Capacity which cannot be separated from the element of competence.

The aim of the research is to analyze the right strategy for the competence of weavers in order to increase the production of woven fabrics in Alor Regency. The method used is descriptive qualitative method using Spencer and Spencer's Competency Theory (1993) and Regional Development supported by SWOT Analysis to determine the right strategy.

The results of the study show that the Motive Aspect, that the Motivation and Morale Sub-Aspect is strong, comes from the owner and the main governing body, while the Feedback Sub Aspect has not been utilized. Aspects of Traits are still lacking, especially in the Attitude Sub Aspect. While the Physical Endurance Sub Aspect is good. Aspects of Self-Concept already have self-confidence from individuals and groups and Aspects of Knowledge. Formal is still lacking, while the non-formal education aspect is sufficient and the informal is the highest. Aspects of Skills and Expertise already have a specificity or uniqueness that is difficult to imitate. The strategy applied are the short term through training the process of ikkaten weaving routinely, middle term is to collaborate with stake holders and long the term strategy is to follow the formal and non formal education.

Keywords: *Strategy; Weaver Competency; Regional development; Industrial Sector; Ikat Weaving.*

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Permasalahan.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Kebijakan dan Teori	22
C. Kerangka Berpikir.....	61
D. Operasionalisasi Konsep.....	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	65
A. Metode Penelitian.....	65
B. Teknik Pengumpulan Data	67
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	72
D. Instrumen Penelitian.....	76
BAB IV HASIL PENELITIAN	79
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	85
C. Hasil Analisis	110
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	117
A. Simpulan	117
B. Saran.....	119
C. Rekomendasi	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	125



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Persebaran Tenun di NTT Menurut Jenis dan Asal Daerah	7
Tabel I.2 Data Jumlah Kelompok Tenun dan Penenun Per Kecamatan se- Kabupaten Alor Tahun 2017	9
Tabel I.3 Data Jumlah Kelompok Tenun dan Penenun Per Kecamatan se- Kabupaten Alor Tahun 2018	10
Tabel I.4 Persentasi Latar Belakang Pendidikan Penenun Tiga Kelompok	12
Tabel I.5 Data Jenis Industri di Kecamatan Alor Barat Laut.	1
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel III.1 Informan dan Jumlah pada Tenun Ikat	70
Tabel III.2 Kisi-Kisi Pengumpulan Data	77
Tabel IV.1 Tingkat Pendidikan Badan Pengurus STIGM Tahun 2023	100
Tabel IV.2 Hasil Analisis Penilaian Pengembangan <i>Spencer and Spencer</i>	110
Tabel IV.3 Analisis Kompetensi Penenun berdasarkan Teori Spencer and Spencer	111
Tabel IV.4 Analisis SWOT Kompetensi Penenun Ikat Alor	114

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

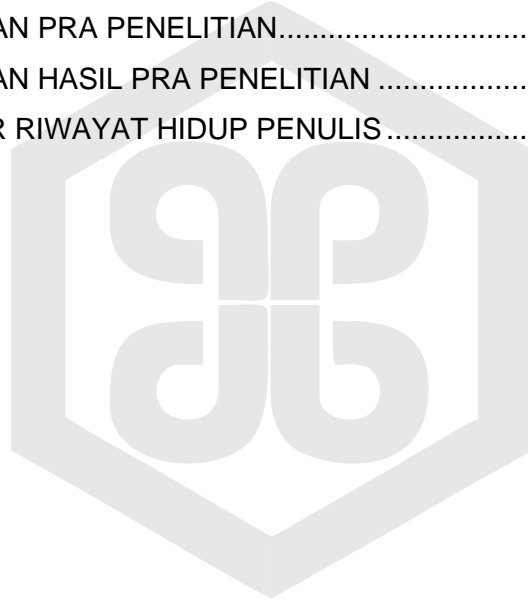
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar II.1 Konsep Kompetensi.....	49
Gambar II.2 Kerangka Berpikir Strategi Peningkatan Kompetensi Penenun dalam Mendukung Pembangunan Sektor Industri pada Sentra Tenun Ikat Gunung Mako, Desa Alor Besar, Kabupaten Alor Provinsi NTT.....	62
Gambar IV.1 <i>Lokasi Sentra Tenun Ikat Gunung Mako</i>	81
Gambar IV.2 Struktur Badan Pengurus Sentra Tenun Ikat Gunung Mako (STIGM) Desa Alor Besar.....	83

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 TRANSKRIP WAWANCARA	125
LAMPIRAN 2 LAPORAN PRA PENELITIAN.....	154
LAMPIRAN 3 LAPORAN HASIL PRA PENELITIAN	156
LAMPIRAN 4 DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	163



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Tujuan Hidup manusia di dunia adalah untuk mencapai kebahagiaan (*Eudaimonia*). Kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah sebuah keadaan perasaan yang tidak saja bersifat sementara (kesenangan), tapi yang bersifat permanen, di mana telah terpenuhinya semua kebutuhan hidup baik material, terutama spiritual atau telah mencapai kesempurnaan. (Aristoteles, 386 SM).

Kebahagiaan dalam Konteks Pembangunan diterjemahkan dengan kesejahteraan (*Welfare*) untuk pribadi dan kesejahteraan bersama (*Social Welfare*), di mana merupakan tujuan pembangunan pada umumnya. Pembangunan didefinisikan sebagai sebuah upaya sadar manusia untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran dan rasa keadilan. (Siagian; 1994). Tjokrohamidjojo (1976) menambahkan, bahwa pembangunan bertujuan memenuhi kebutuhan material dan non material atau dunia dan akhirat. Sementara itu, Kartasasmita (1994) mendefinisikan lebih sederhana, yaitu: suatu proses ke arah perubahan yang lebih baik melalui upaya yang dilaksanakan secara terencana. Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka dapat dirumuskan unsur-unsur terkait dengan pembangunan (*development*), yakni: adanya unsur tujuan yang hendak dicapai dan upaya-upaya secara sadar atau terencana dengan akal pikiran yang sehat untuk mencapainya secara bertahap dalam masa jangka pendan, sedang dan panjang.

Cita-cita dan harapan bersama ini menjadi tugas dan tanggungjawab (amanah) Negara untuk menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas public serta seluruh lingkungan yang memengaruhinya (*circumstance*) agar tujuan tersebut dapat tercapai dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebaliknya, Negara akan terancam keutuhannya, apabila Negara gagal atau tidak mampu memuhi kebutuhan hidup dan permasalahan orang banyak, maka Negara akan dituntut oleh warga negaranya. (Siagian; 1994; Khodijah Ishak, SH.I, 2018; Habib, 2021). Fakta Empiris membuktikan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak

semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Apakah factor penyebabnya bisa berupa bencana alam dan atau pun barasal dari bencana social atau karena ulah manusia sendiri sehingga menimbulkan masalah baru (*octopus development*).

Berdasarkan Sejarah, Konsep Pembangunan (*Developmentalisme*) telah berkembang sejak Zaman Yunani Kuno dalam pembicaraan seputar politik dan masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah Ideologi Pembangunan (*Developmental Ideology*) dengan Dasar filosofisnya adalah ide akan kemajuan (*the idea of progress*). Kemudian, benih ideologi ini mulai bertumbuh pesat sejak Pasca Perang Dunia II (1940-1950) di mana ketika itu banyak Negara – Negara di dunia yang baru memperoleh kemerdekaan dari penjajahan, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1945 yang baru mulai mengejar ketertinggalannya melalui konsep pembangunan ekonomi. Namun, beberapa ahli menyangsikan konsep dan teori pembangunan yang mengarah pada Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) yang ditawarkan Negara – Negara Maju (*Developed Country*). Bagi para pakar ekonomi, tawaran dari Negara Maju kepada Negara baru atau Negara Sedang Berkembang (NSB) itu sebagai sebuah bentuk penjajahan gaya baru (*Neokolonisme*), dengan mengajukan pertanyaan, bahwa apabila pembangunan diartikan sebagai kemajuan, maka bagaimana mengukur kemajuan tersebut? Bentuk masyarakat seperti apa yang menjadi arah dan tujuan pembangunan? Perubahan apa yang senantiasa (dinamis) dalam masyarakat yang disebut maju, karena tidak semua perubahan mengarah pada kemajuan? (J.B.Bury, 1920; Robert Nisbet, 1980; Perdana, 2018; Sukmawati, 2018; Habib, 2021; Susanti, 2021; Noor Santy and Syahirul Alam, 2022; Wiharja, Ramdani and Mutiah, 2023).

Beberapa pertanyaan reflektif di atas menjadi “benang merah” bagi Negara maupun pelaku pembangunan, karena latar belakang teori pembangunan berasal dari negara-negara maju dengan budaya yang berbeda sebagaimana istilah ideologi *developmentalis* berpusat pada pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang berasumsi, bahwa untuk mencapai kesejahteraan atau pun kemajuan sebuah negara (modern) melalui ekonomi kapitalisme dan progres politik melalui demokrasi. Dalam konteks ini, kemudian bermunculan pandangan-pandangan dari negara-negara yang baru selesai Perang Dunia II, yang menerapkan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan di Bidang

Ekonomi dengan bantuan negara-negara maju, namun apa lacur? Kebijakan Pembangunan ini meninggalkan sifat ketergantungan (dependensi) dari negara-negara dunia ketiga. Maka muncullah ideologi ekonomi (teologi) pembebasan di Amerika Latin dan negara-negara miskin lainnya. (Sosiology.com, 2018).

Konsep Pembangunan Ekonomi yang ditawarkan NKRI sejak awal kemerdekaannya adalah Ekonomi Koperasi yang digagas oleh Muhammad Hatta (Bung Hatta) dalam [Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945](#), namun dalam perkembangannya pada Masa Orde Lama (1945 - 1966), situasi politik yang tidak menentu menyebabkan tidak mampu membangun secara baik dan berganti dengan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun sejak 1966. Pada masa ini kebijakan ekonomi merujuk pada Teori Pertumbuhan Ekonomi yang dikembangkan oleh [Walt W. Rostow \(1993\)](#). Menurut Ekonom berkebangsaan Amerika ini, bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat linear di mana pertumbuhan ekonomi melalui tahapan – tahapan seperti: Tahap Masyarakat Tradisional, Tahap Persyaratan Tinggal Landas, Tahap Tinggal Landas dan Tahap Kedewasaan (Konsumsi). [Teori Rostow](#) ini berpengaruh di dunia dan digunakan juga di Indonesia dengan Konsep Rencana Pembangunan Tiga Tahun (Repetita), Lima Tahun (Repelita) dan Jangka Panjang (25 Tahun). Meskipun pada akhirnya konsep ini mendapatkan sorotan dari para pakar ekonomi dunia karena latar belakang kehidupan ekonomi yang berbeda dan tidak memperhatikan kemajuan era teknologi dan informasi yang bisa berdampak pada loncatan ekonomi dan pada perjalanan Bangsa Indonesia tidak membawakan hasil yang signifikan dan terjadi krisis moneter hingga berdampak pada krisis politik, namun pada aras tertentu dalam konsep perencanaan masih bisa digunakan agar dapat digunakan Pengawasan dan Evaluasi (*Monitoring dan Evaluasi*) dalam sebuah manajemen. (Www.Kompas.com).

Penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut ideologi pembangunan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana termaktub dalam, [Alinea IV Pembukaan UUD 1945](#) berbunyi: *“Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang*

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa yaitu: adil dan makmur.”

Dalam melaksanakan cita-cita nasional tersebut, tidak lepas dari Tujuan Pembangunan Nasional di Seluruh Wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu: 1) Terbangunnya sistem politik yang demokratis; 2) Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*); 3) Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di Berbagai Sektor Kehidupan; 4) Terciptanya kesejahteraan rakyat; 5) Mencerdaskan kehidupan bangsa. (Liputan6.com, 2019).

Tujuan hidup berbangsa dan bernegara pada hakekatnya adalah untuk mengsejahterakan rakyat dan pemerintah sebagai alat negara memang peran yang sangat penting dalam mewujudnyatakannya. Krisis Ekonomi dan Moneter pada 1998/ 1999 memaksa Pemerintah Pusat mengambil kebijakan baru mengeluarkan [Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah](#) di mana daerah–daerah otonom diberikan kewenangan mengatur daerahnya atas inisiatif sendiri di dalam Wadah NKRI yang kemudian bergantinya Orde Baru menjadi Orde Reformasi hingga kini.

Pada Orde Reformasi muncul Konsep Otonomi Daerah, di mana pada masa sebelumnya pemerintahan yang dijalankan secara sentralistik, yang mana Pemerintah Pusat memegang peran sentral berganti paradigma baru menjadi desentralistik dengan pembagian urusan dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi berdasarkan Asas Dekonsentrasi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Asas Desntalisasi sebagaimana tertera dalam [UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#). Pembagian kewenangan yang menjadi urusan pusat terdapat dalam bab dan pasal–pasal sebagai berikut: BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN, Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan, *Pasal 9* Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada *ayat (1)* adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada *ayat (1)* adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan

Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Pada Bagian Kedua, Urusan Pemerintahan Absolut, *Pasal 10*, Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 9 ayat (2)* meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. Melaksanakan sendiri; atau b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Dekonsentrasi.

Pembangunan Daerah merupakan sebuah usaha sadar manusia pada sebuah wilayah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dilakukan, karena sumber daya yang serba terbatas dan berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya, sehingga penting untuk dioptimalkan agar mencapai hasil yang berdaya guna. Selain itu, agar implementasi pembangunan dapat berjalan secara teratur, terukur, tersistem, efektif dan efisien. (Bintoro; 1976). Sementara, Soepomo (2010) menambahkan, Sumber Daya (*Resource*) menjadi tiga jenis yang saling melengkapi, yaitu: Sumber Daya Manusia/ SDM (*Human Resource*), Sumber Daya Alam/ SDA (*Natural Resource*) dan Sumber Daya Sosial/ SDS (*Social Resource*). Ketiganya diperlukan dalam mencapai sebuah tujuan pembangunan. Sebaliknya, Keterbatasan SDM, Kurangnya SDA dan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang kurang mendukung serta buruknya manajemen akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Di sini, Perbedaan SDA di satu wilayah dengan wilayah lainnya pun menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan. Hal ini akan memacu ketimpangan pembangunan yang menyeret suatu daerah dikatakan daerah maju atau pun terbelakang. Problematika tersebut di atas menjadi faktor-faktor yang harus diperhatikan dengan serius oleh aktor-artis pembangunan agar bisa mencapai tujuan pembangunan. (Adhanita, 2013; Yusuf and Ridwan, 2018; Kamilah, 2019; Kono *et al.*, 2022)

Masalah pokok dalam pembangunan daerah biasanya adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*Endogenous Development*) dengan

menggunakan potensi SDM, kelembagaan, dan Sumber Daya Fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang (*stimulus*) kegiatan ekonomi. ([yumeikochi, 16 Mei 2011, Majalah Perekonomian Indonesia](#)).

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses, yaitu: proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dengan demikian usaha-usaha baru di bidang ekonomi bisnis mulai bertumbuh dari skala kecil hingga besar dengan memanfaatkan potensi SDA dan SDS yang tersedia di suatu wilayah dan antara wilayah (Ekonomi Regional). Di sini sector ekonomi dan perdagangan mulai menggeliat dan bekerja melalui industri.

Sektor Industri memegang peran yang penting dalam perekonomian nasional dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) diketahui mampu bertahan dari gejolak krisis nasional, ketika banyak industri besar yang *kolaps* dan gulung tikar ketika badai krisis moneter 1998 menghadang Bangsa Indonesia. Salah satu industri kecil yang memiliki potensi yang menyebar di Seluruh Indonesia adalah industri kerajinan tenun, di mana Kerajinan Tenun dalam konteks pembangunan nasional, masuk dalam Jenis Industri Kerajinan dari Sub Sektor Industri Kecil Menengah (IKM) yang menjadi tulang punggung penggerak perekonomian Indonesia. Kedudukan IKM sangat strategis dalam perekonomian nasional, karena jumlah unit usahanya yang cukup besar (+ 3,4 juta), dan menyerap tenaga kerja + 8,5 juta. ([Dirjen IKM, 2006 dalam Tesis, Djobo, 2022-Tidak Dipublikasi](#)).

Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi NTT (Pemprov. NTT) yang memiliki potensi daerah tentang menenun dalam sisi kuantitas maupun kualitas menyikapi dengan mengeluarkan kebijakan berupa [Surat Edaran Gubernur NTT, Nomor BO.165/III/2019 tentang Penggunaan Sarung Tenun Ikat Motif Daerah Nusa Tenggara Timur bagi Aparatur Sipil Negara \(ASN\) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT setiap Selasa dan Jumat menggunakan sarung tenun motif daerah serta pada Kamis menggunakan Pakaian Dinas Harian \(PDH\) dari tenunan motif daerah](#). Kebijakan Pemprov. NTT tersebut ditindak lanjuti

dengan kebijakan di daerah-daerah kabupaten/ kota se-NTT dengan mewajibkan para ASN mengenakan tenunan daerah masing-masing pada hari tertentu. Kabupaten Alor sendiri kepada para pegawai dan murid sekolah mengenakan tenunan pada setiap hari kamis selama jam kantor. Dengan demikian kebijakan berantai ini mampu merangsang para penenun agar bergeliat memproduksi kain tenun karena pasar dalam daerah tersedia.

Potensi pengembangan industri yang berasal dari daerah-daerah ini didasarkan pada potensi tenun dari 22 kabupaten/ kota se - NTT sesuai latar belakang suku dan motif daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Persebaran Tenun di NTT Menurut Jenis dan Asal Daerah

No.	Jenis Tenunan	Asal Daerah Kabupaten/ Kota
1.	Ikat	Merata di Seluruh NTT, kecuali Manggarai dan sebagian Ngada.
2.	Buna	Kota Kupang, Belu, TTS dan TTU. Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS,
3.	Sotis/ Lotis/ Songket/ Songke	TTU, Belu, Alor , Flores Timur, Lembata, Sikka, Ngada, dan Manggarai.

(Sumber : Tempo.com, Kamis 2 Desember 2010 15:05 WIB, diakses pada Jumad, 6 Mei 2022 09:17 WITA).

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas, menunjukkan, bahwa Jenis Tenun Ikat dapat dikerjakan di sebagian besar kabupaten/ kota di NTT, kecuali di Manggarai Raya (Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat (Pulau Flores bagian barat) dan Kabupaten Ngada (Pulau Flores bagian tengah berbatasan dengan Manggarai Timur). Sedangkan Tenun Buna hanya dapat dilakukan di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Pulau Timor. Sementara, Tenun Songket berkembang di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Flores Timur, Lembata, Sikka, Ngada, Manggarai dan Kabupaten Alor.

Sila (2013); Mammoria (2016); Anggraeni (2017); Tahrir, Rohidi and Iswidayati (2017); Bifawa'idati *et al.* (2017); Lestari and Riyanti (2017); Ayu, Wardenaar and Mariani (2018); Engriani and Budiarti (2019); Pebriyeni (2019); Purwati *et al.* (2021); anzil, Tanlain and Githapradana (2021); Wangge (2021);

Dewi (2021); Ningsih, Rianita and Puspawati (2021); Hendra and Agustin (2022); Yulian (2023) berpendapat, bahwa: Tenun Songket adalah Tata cara atau teknik Pembuatan Kain Tenun dengan menambahkan benang berwarna emas atau perak pada jalinan benang pakan atau benang lungsi dengan cara menyungkit benang–benang tersebut. Tenun Songket adalah suatu produk yang harus berinovasi dengan perkembangan jaman tanpa harus melupakan tradisi dan Motif yang melekat pada daerah tertentu. Dalam pengembangan tenun songket pada era digitalisasi ini juga sudah seharusnya dilakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para penenun tradisional songket ini.

Merujuk pada data dan informasi di atas, maka diketahui, bahwa terdapat dua jenis kerajinan tenun yang berkembang di Kabupaten Alor, yaitu: Tenun Ikat dan Tenun Songket. Sedangkan Tenun Buna tidak terdapat di Kabupaten Alor dan beberapa Kabupaten di NTT. Tenun Ikat pada umumnya berkembang di Wilayah Pulau Alor Bagian Barat dan Utara Pulau Alor serta sebagian Wilayah Pulau Pantar Bagian Timur dan Tengah. Sedangkan Tenun Songket berkembang di Wilayah Pedalaman Pesisir Pulau Alor Bagian Timur hingga ke Selatan dan Barat Daya dan Pulau Pantar Bagian Barat hingga ke Barat Laut. Sementara untuk Wilayah Perkotaan, Kecamatan Teluk Mutiara berkembang kedua jenis tenunan ini, karena bermukim berbagai suku dari Pulau Besar dan Pulau-pulau kecil yang melanjutkan pekerjaan menenun.

Perbedaan mencolok dari dua jenis tenun yang berkembang di Kabupaten Alor, selain berdasarkan aspek geografis penyebarannya, juga terdapat pergeseran makna di mana pada tenun songket masih kental dengan makna social budaya, sehingga kurang kreatif dan inovatif, sedangkan pada tenun ikat lebih terbuka dan menjurus ke makna ekonomis dan inovatif, sehingga lebih bernilai perubahan dan seni (estetika). Meskipun demikian keduanya masih mempertahankan menenun dengan sistem bahan dan pewarna alamiah (tradisional). Dalam konteks budaya tenun yang telah menyebar di seluruh pelosok nusantara sangat menjanjikan. Budaya tenun telah menjadi primadona bangsa. Seperti Batik dari Pulau Jawa telah diakui dunia melalui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia atau Warisan Budaya Tak Benda (WBTD). Begitu pun jenis-jenis kain tenun dari Sumatra hingga Papua dan Sulawesi Utara hingga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (Zonalinenews.com).

Menenun di Kabupaten Alor merupakan warisan budaya leluhur yang dipelihara oleh suku-suku yang menyebar, namun pada masa sekarang pekerjaan menenun lebih banyak dilakukan oleh masyarakat Alor pada Wilayah Lingkaran Pesisir Pantai hingga ke Pulau-pulau Sedang dan Kecil. Meskipun awalnya tidak diperjualbelikan, namun dalam perkembangannya sangat menjanjikan dalam prospek ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehingga, pekerjaan tangan yang kebanyakan dikerjakan oleh kaum perempuan ini kemudian berkembang secara signifikan pada Era 2000-an, ketika memasuki Reformasi. *Event-event* budaya yang dilaksanakan oleh Pihak Pemerintah Daerah pada masa Otonomi Daerah, ternyata membawa dampak positif yang besar, baik manfaat memperkenalkan budaya, menambah pendapatan ekonomi dan merangsang perasaan seni (estetika) dari kriya kain tenun di Kabupaten Alor, baik tenun ikat maupun tenun songket di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan/ desa. (Indikator Geografis Tenun Alor, 2018).

Dalam perkembangannya, tenun menjadi semakin diminati oleh kalangan dalam negeri maupun luar negeri hingga dipromosikan ke tingkat nasional dan bahkan internasional. Berikut disajikan data jumlah kelompok tenun dan penenun dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Alor.

Tabel I.2 Data Jumlah Kelompok Tenun dan Penenun Per Kecamatan se-Kabupaten Alor Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelompok Tenun				Ket.
		Ikat	Anggota	Songket	Anggota	
1.	Teluk Mutiara	3	27			
2.	Alor Barat Laut (ABAL)	8	57			
3.	Kabola	-	-			Kulit Kayu
4.	Alor Tengah Utara	1	10			
5.	Lembur	-	-			Tdk tenun
6.	Alor Timur Laut			4	43	
7.	Alor Timur			3	46	
8.	Pureman			5	72	
9.	Alor Selatan			1	10	
10.	Mataru			1	15	
11.	Alor Barat Daya (ABAD)			3	55	
12.	Pulau Pura	1	5			

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelompok Tenun				Ket.
		Ikatan	Anggota	Songket	Anggota	
13.	Pantar Timur	4	52			
14.	Pantar	6	26			
15.	Pantar Tengah	1	1			
16.	Pantar Barat	8	77			
17.	Pantar Barat Laut	3	57			
	TOTAL	44	496	21	241	

(Sumber: Olahan Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, 2017).

Berdasarkan data pada Tabel 1.2. di atas, dapat dijelaskan, bahwa Dinas Perindustrian Kabupaten Alor mencatat terdapat 9 kecamatan yang memiliki 44 kelompok Tenun Ikatan dan 496 penenun. Sementara, Tenun Songket terdapat 21 kelompok dengan 241 personil penenun dari 6 kecamatan se-Kabupaten Alor. Jadi dari sisi banyaknya kecamatan, maka lebih banyak kecamatan menenun ikatan (9 kecamatan) dari pada tenun songket (6) kecamatan. Jumlah penenun pun hampir berbanding 50 persen lebih untuk penenun ikatan (496) dari penenun songket (241). Sementara dua kecamatan belum memiliki kelompok tenun dan juga penenun yang didata Pihak Dinas Perindustrian Kabupaten Alor Tahun 2017.

Pada tahun berikutnya (2018) para penenun dan kelompok tenun dipetakan ke dalam Asosiasi Pengrajin Tenun Ikatan Alor (APTIA) dan Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA) Kabupaten Alor sebagaimana tabel di bawah:

Tabel I.3 Data Jumlah Kelompok Tenun dan Penenun Per Kecamatan se-Kabupaten Alor Tahun 2018

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelompok Tenun				Ket.
		Ikatan	Anggota	Songket	Anggota	
1.	Teluk Mutiara	2	13	7	63	
2.	Alor Barat Laut (ABAL)	12	281	-	-	
3.	Kabola	-	-	-	-	Kulit kayu
4.	Alor Tengah Utara	-	-	1	5	
5.	Lembur	-	-	-	-	Tdk tenun
6.	Alor Timur Laut	-	-	2	16	
7.	Alor Timur	-	-	5	72	
8.	Pureman	-	-	2	12	
9.	Alor Selatan	-	-	3	34	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelompok Tenun				Ket.
		Ikat	Anggota	Songket	Anggota	
10.	Mataru	-	-	1	16	
11.	Alor Barat Daya (ABAD)	-	-	5	84	
12.	Pulau Pura	1	11	-	-	
13.	Pantar Timur	3	27	-	-	
14.	Pantar	-	-	-	-	Blm terdftr
15.	Pantar Tengah	-	-	-	-	Blm terdftr
16.	Pantar Barat	9	180	-	-	
17.	Pantar Barat Laut	2	17	-	-	
	TOTAL	29	529	26	302	

(Sumber: Olahan Indikasi Geografis APTIA & APTSA, 2018).

Berdasarkan Tabel 1.3. di atas, menunjukkan, bahwa terdapat 29 Kelompok Tenun Ikat dengan jumlah penenun 529 orang dan Kelompok Tenun Songket berjumlah 26 kelompok dengan jumlah penenun 302 orang. Dua kecamatan masing-masing, yaitu: Kecamatan Kabola dan Lembur masih tetap belum memiliki kelompok dan penenun, sementara dua kecamatan di Pulau Pantar, masing-masing Kecamatan Pantar dan Pantar Tengah, meskipun terdapat kelompok dan penenun, namun tidak terdaftar pada Indikasi Geografis (IG) dari APTIA dan APTSA Tahun 2018.

Apabila kedua data pada tahun 2017 dan 2018 ini dikomparasikan, maka terdapat pengurangan kelompok dan penenun ikat dari 44 kelompok menjadi 29 kelompok dan peningkatan jumlah penenun dari 496 menjadi 529 penenun. Sementara itu, kategori tenun songket, terjadi peningkatan jumlah kelompok dan penenun dari 21 kelompok menjadi 26 kelompok dan penenun dari 241 menjadi 302 penenun songket se-Kabupaten Alor Tahun 2018. Maka dari sisi jumlah Kelompok Tenun Ikat lebih banyak dari Kelompok Tenun Songket, yaitu: 29 kelompok berbanding 26 kelompok, berarti selisih tipis, hanya beda tiga kelompok, sedangkan jumlah penenun masih terbanyak pada Tenun Ikat dengan jumlah 529 berbanding 302 penenun. Hampir berbanding 50 persen. Perbedaan jumlah tersebut tidak menunjukkan perbedaan kualitas hasil tenunan, karena keduanya memiliki pola tenun yang berbeda.

Berdasarkan Data dari Dinas Perindustrian Kabupaten Alor (2017) dan APTIA serta APTSA (2018) juga menunjukkan, bahwa belum semua kelompok

diakomodir dalam asosiasi dan kelompok tenun masih bertumbuh di setiap kecamatan, seperti pada Kecamatan Kabola yang memiliki tradisi berbusana kulit kayu, kini mulai mengembangkan busana kain tenun berdasarkan Etnis Lawahing yang sudah mulai nampak hasilnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya bahwa tenun merupakan juga identitas dan jati diri etnis yang mulai digali kembali (revitalisasi) sebagai yang memiliki nilai-nilai budaya luhur. Sementara di Kecamatan Lembur yang tidak dikenal sebagai budaya tenun sudah mulai muncul, karena faktor kawin-mawin antar suku. Hal ini merupakan hal yang positif dari persebaran tenun di Kabupaten Alor.

Meskipun demikian, bila dikaji dari Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menguji Kompetensi, maka mayoritas penenun adalah tidak mengenyam pendidikan formal, sehingga menghalangi langkah-langkah lain yang berhubungan dengan pemahaman dalam menerima pembaharuan sebagaimana data yang diperoleh saat melakukan Penelitian Awal (Pra Penelitian) di beberapa lokasi tenun se-Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL) sebagai berikut:

Tabel 1.4 Persentasi Latar Belakang Pendidikan Penenun Tiga Kelompok

No.	Nama Kelompok	Tingkat Pendidikan					Ket
		Tdk Tmt SD (%)	SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	PT (%)	
1.	Biatabang, Ds. Ternate Selatan	50	40	10	0	0	100
2.	Cakrawala, Ds. Ternate	40	40	20	0	0	100
3.	Gunung Mako, Ds. Alor Besar	30	40	20	10	0	100

(Sumber: Hasil Pengamatan dan Wawancara bersama Klpk. Tenun pada Observasi Awal, 17- 18 Maret 2022).

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, mau menggambarkan, bahwa tingkat pendidikan formal dari para penenun sangat terbatas. Untuk tingkat sarjana belum terdapat seorang pun yang khusus belajar tentang tenun atau menjurus ke jurusan yang baik untuk pengembangan tenun. Pendidikan Dasar untuk SMA juga hanya yang tinggal di kota dan terbanyak penenun adalah tamat SMP dan SD.

Pengalaman memenu diperoleh dari rumah tangga (*home industry*) dan suku sebagai warisan leluhur (Informal) dan untuk kursus-kursus (non formal) juga sangat terbatas.

Mencermati fenomena Potensi Daerah di Sektor Industri, khususnya Industri Tenun, Pemerintah Kabupaten Alor mengagendakannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor, 2019-2024, di mana tenun termasuk dalam potensi unggul daerah yang dikaji oleh beberapa sektor Pembangunan Daerah, yakni: Sektor Budaya, Pariwisata, Koperasi dan UMKM serta Industri. Sektor Industri yang berkembang di Kabupaten Alor adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM), seperti industri pengolahan, kerajinan rumah tangga makanan dan minuman, serta kerajinan bambu dan tenun. Kerajinan Tenun masuk dalam agenda tahunan berupa Expo dan Festival Budaya Alor sebagai bagian dari promosi dan jual beli membangun relasi bisnis lebih jauh. Pemerintah Daerah juga mengalami kurangnya Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga hanya mampu membiayai beberapa *item* kegiatan yang dipandang mendesak dan mudah direalisasikan.

Pemerintah Kabupaten Alor telah mengkluster Wilayah Kecamatan ABAL sebagai Kawasan Industri dengan mengoptimalkan industri kecil sebagaimana pada tabel yang terpampang di bawah ini:

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Tabel I.5 Data Jenis Industri di Kecamatan Alor Barat Laut.

Desa/ Kelurahan	Kue/ Roti		Aneka Kripik		Batu bata & batako		Meubel kayu & bambu		Tenun ikat		Tambal Ban		Lainnya		Jumlah	
	Unit	Pekerja	Unit	Pekerja	Unit	Pekerja	Unit	Pekerja	Unit	Pekerja	Unit	Pekerja	Unit	Pekerja	Unit	Pekerja
Lewalu	2	2	3	3	2	2			2	2	2	2			11	11
Dulolong	1	1	5	5			1	1			2	2			9	9
Aimoli			1	1							2	2			3	3
Alaang			1	15			1	4							2	19
Alor Besar							4	4							4	4
Alor Kecil									2	14			2	7	4	21
Alor Besar									11	29	3	3	1	25	15	57
Ternate									7	71					7	71
Pulau Buaya									2	41					2	41
Alila													1	3	1	3
Jumlah	3	3	10	24	2	2	6	9	24	157	9	9	4	35	58	239

(Sumber: Indikator Ekonomi (Tesis Amon Djobo, 2022, belum dipublikasi)).

Berdasarkan tabel 1.5. di atas mau menjelaskan, bahwa Sektor Industri, secara khusus Industri Pengolahan yang paling berkembang di Kecamatan ABAL dari 9 desa. Jumlah Industri Tenun terbanyak dengan jumlah 11 unit (kelompok), dengan jumlah anggotanya 29 orang dan masih kurang dari anggota Desa Ternate yang berjumlah 7 orang. Namun dari sisi kelompok hanya berjumlah 7 kelompok. Posisi jumlah anggota kelompok juga banyak di Pulau Buaya dengan jumlah 41 orang, sementara jumlah kelompok hanya dua unit. Hal ini menjadi buah pengumpulan bagi pengambil kebijakan guna meningkatkan usaha pribadi maupun kelompok dengan minat penenun yang cukup banyak, sekaligus dugaan bahwa unit kelompok belum membawa manfaat yang besar bagi anggota atau pun SDM penenun belum mampu membentuk kelompok serta masih terbawa dengan warisan budaya yang turun ke Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) yang terdiri dari satu keluarga, baik keluarga kecil (*batih*), maupun keluarga besar yang terdiri dari: nenek, ibu, bapak dan anak-anak (cucu-cucu), khususnya anak perempuan. Jadi industri yang berkembang adalah Industri Mikro dan Kecil, sementara Sedang dan Besar belum berkembang dengan modal usaha yang kecil pula. Pemerintah Kabupaten Alor sudah mengembangkan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Sebanjar, Desa Alor Besar yang strategis dengan Kawasan Pariwisata Taman Laut Selat Pantar, namun belum dapat dimanfaatkan, karena beberapa sebab yang belum dicarikan solusinya.

Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB total memang cenderung berfluktuasi meskipun besarnya bertambah dari waktu ke waktu. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2017 mencapai 1,46 persen, kemudian turun sebesar 0,02 poin pada tahun 2018 menjadi 1,44 persen, dan pada tahun 2019 naik 0,02 poin menjadi 1,46 persen. Namun berdasarkan besaran PDRB sektornya yang setiap tahun semakin bertambah, menunjukkan bahwa sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan. Dikarenakan industri ini masih sebagian besar digerakkan oleh Rumah Tangga (*Home Industry*), maka diperlukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing di era milenial seperti saat ini. Selain itu, hasil maupun barang kreasi hasil dari industri pengolahan ini juga diharapkan mempunyai wadah untuk dilakukan penjualan dengan harga yang kompetitif sehingga *omset* yang diperoleh juga menguntungkan bagi para pengusaha rumah tangga ([Indikator Ekonomi](#)

Kabupaten Alor, BPS Alor 2019). Artinya, bahwa sector ini memiliki prospek ke depan, namun masih terkendala dengan pengembangannya baik dari intervensi kebijakan pemerintah, dukungan modal dan SDM dari Pihak Swasta maupun dari Pihak Masyarakat itu sendiri dalam mengelola bahan mentah ke dalam bahan setengah jadi dan bahan jadi (Ekonomi Riil) agar terjadi pertumbuhan ekonomi.

Peneliti merasa tertarik untuk meneliti khusus tenun ikat di Kecamatan Alor Barat Laut, karena **Pertama**, Kecamatan ABAL menjadi Sentra Kawasan Industri Tenun Kabupaten Alor dan memiliki konsep pembangunan tenun menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), namun hingga kini peralatan tersebut belum difungsikan. **Kedua**, daya juang para pelaku usaha bisnis tenun ikat lebih militan dalam pemasarannya dibandingkan dengan penenun songket yang masih terikat dengan budaya, sehingga lamban dalam proses produksi dan distribusi pemasaran. **Ketiga**, berdasarkan Hasil Observasi Awal (Kamis – Jumad, 16-17 Maret 2022) di beberapa kelompok tenun di tiga desa, masing – masing: Desa Alor Besar, Pulau Alor (Tiga Titik), Desa Ternate dan Ternate Selatan, Pulau Ternate, masing-masing satu titik (**Laporan Pra Penelitian Terlampir**), peneliti menemukan berbagai persoalan yang dihadapi secara langsung baik melalui wawancara (*interview*) kepada penulis maupun secara pengamatan langsung di lapangan (observasi). Sejumlah permasalahan tersebut setelah dikuantifikasi, maka terbanyak dan paling mendasar adalah masalah kompetensi penenun yang tidak berimbang antara Pengetahuan (*knowledge*), Ketrampilan (*Skill*), Sikap (*Traits*), Gambaran Diri (*Self-Concept*), dan Motif (*Motives*).

Selain itu, setelah beberapa kelompok di-*survey* untuk lokasi penelitian, peneliti memilih Sentra Tenun Ikat Gunung Mako, Kampung Petumolu-Dusun II Hula, Desa Alor Besar, Kecamatan ABAL, karena tempat usaha cukup representatif, di mana telah memiliki gedung sendiri dan ada produksi serta jaringan kerja yang baik, meskipun masih bekerja secara otodidak. Badan Usaha yang telah berkembang dari Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) ke Kelompok Usaha (Sentra Industri) ini telah memiliki izin usaha dibandingkan dengan kelompok usaha lain yang masih di bawah pengawasan desa dan usaha perseorangan. Sentra Tenun ini juga telah memiliki sejumlah jaringan kerja dengan penenun, baik dalam kelompok–kelompok, rumah tangga dan perorangan baik di Pulau Alor beberapa desa, maupun di beberapa pulau se-Kecamatan ABAL,

bahkan di Kota Kalabahi, Ibu Kota Kabupaten Alor dan Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi NTT dan juga di Kota Surabaya, Jawa Timur, di mana hanya karena Pandemi Covid-19 di awal 2020, maka jaringan kerja itu terputus.

Mencermati potensi daerah yang menjanjikan tersebut di atas, namun belum dikelola secara baik sesuai dengan manajemen yang professional berdasarkan Prinsip Enam M, yaitu: *Man* (Manusia), *Machine* (Mesin), *Method* (Metode), *Modals* (Dana dan Aset), *Materials* (Bahan) dan *Market* (Pasar), terutama unsur manusia dalam kehidupan sosial dan pendidikan, maka peneliti, --berdasarkan juga hasil observasi awal, menjatuhkan pilihan untuk meneliti lebih jauh persoalan yang sedang dihadapi masyarakat penenun, khususnya penenun ikat di Kecamatan ABAL, Kabupaten Alor, NTT yang merupakan masyarakat dengan Sumber Daya Alam yang serba terbatas. Peneliti berpikir, bahwa unsur *Man* atau Manusia (Sumber Daya Manusia) paling berpengaruh dalam mengoptimalkan manajemen sebagai subyek dan obyek dari pembangunan *in sic*.

Keterbatasan Sumber Daya (*Resources*) membutuhkan sebuah manajemen (tata kelola yang baik). Manajemen itu sendiri berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur atau mengelola. Maka timbul pertanyaan menyusul, yaitu: apa yang diatur, apa tujuan diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya. Lebih lengkapnya adalah: Unsur Enam M yang diatur; tujuannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan; bermanfaat optimal, terorganisasi dan terorganisasi secara baik; yang mengatur adalah pemimpin dengan strukturnya dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan secara berurutan sesuai fungsi manajemen.

Mengkaji kompetensi penenun di Kabupaten Alor membutuhkan sebuah model atau pola strateginya tersendiri, karena terdapat dua jenis tenunan, yaitu: tenun ikat dan tenun songket yang memiliki penenun dan kelompok yang jumlahnya banyak dan menyebar di seluruh kecamatan, namun di sisi yang lain kualitas tenun masih diragukan serta terjadi kreatifitas dan inovasi yang berbeda, di mana disebabkan juga oleh kondisi geografisnya menantang serta penguasaan teknologi informasi yang masih sangat rendah dari para penenun rata-rata berusia lansia. Peneliti berasumsi, bahwa dengan meningkatnya kompetensi penenun, maka akan kinerja organisasi akan lebih meningkat, sehingga dengan demikian akan membawa dampak kesejahteraan bagi anggota.

Keadaan dan kondisi serta dinamika persoalan Sumber Daya Manusia dalam hal ini kompetensi dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam pembangunan di Sektor Industri membutuhkan strategi yang tepat agar tujuan yang telah direncanakan dapat terwujud, sehingga peneliti menempatkan judul:

“Strategi Peningkatan Kompetensi Penenun dalam Mendukung Pembangunan Sektor Industri pada Sentra Tenun Ikat Gunung Mako, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi NTT.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan serangkaian penjelasan pada Latar Belakang Permasalahan Tenun yang dihadapi Masyarakat Penenun Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Tenun Ikat tersebut di atas, sebagaimana diperkuat dengan *Survey* Pra Penelitian pada Maret 2022 lalu, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan (*Education Factor*).

Faktor Pendidikan sangat memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kompetensi seseorang agar mampu memahami dan melaksanakan apa yang disampaikan seseorang. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan formal maupun informal yang sangat minim dipenuhi oleh para penenun ikat di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako beserta jaringan usahanya. Pendidikan yang diperoleh adalah pendidikan non formal yang diperoleh dari keluarga yang mewarisi tradisi tenun. Hal ini tidaklah salah, namun kemampuan menenun harus pula dibaringi dengan kemampuan atau kompetensi yang lain pula.

2. Faktor Pengetahuan (*Knowledge Factor*).

Faktor Pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan akan nilai-nilai budaya dan filosofis dari sebuah motif dan warna tenun yang belum

sepenuhnya dipahami, sehingga kehilangan roh dari budaya tenun dan hanya mementingkan nilai estetika (seni) semata.

3. Faktor Keterampilan Penguasaan Teknologi (*Technology Master Skillful Factor*):

Faktor ini merupakan imbas dari kurangnya pendidikan dan pengetahuan akan penggunaan teknologi informasi guna promosi dan penjualan produk melalui iklan pada jaringan social (*social networking*).

4. Faktor Ekonomi (Economic Factor).

Faktor Ekonomi yang dimaksudkan adalah persoalan desakan atau tekanan ekonomi untuk biaya pendidikan anak sekolah, sehingga mempengaruhi kualitas tenun dan orderan harga yang murah, sehingga berdampak pada anjoknya harga di pasaran.

5. Faktor Budaya (Cultural Factor).

Faktor Budaya yang dimaksudkan adalah masih menghambat tingkat produktifitas, di mana menenun masih dianggap pekerjaan, khusus bagi penenun tertentu dan masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan.

6. Faktor Fisik (Physical Factor).

Faktor Fisik yang dimaksudkan adalah perilaku penenun yang masih menyiratkan persoalan, ketika membutuhkan fisik yang kuat untuk menenun, tapi tidak dibaringi dengan kondisi fisik yang kuat di mana masih melibatkan anak-anak sekolah untuk mencari nafkah, yang sebenarnya masih pada posisi sedang belajar, termasuk belajar menenun, sehingga tidak *full-time* untuk menenun.

Penenun mayoritas berusia lanjut (lansia) dengan rata-rata 60 tahun ke atas yang kurang mendapatkan pendidikan formal, karena berada di daerah kepulauan dan akses pendidikan yang terlambat. Sementara pada generasi berikutnya lebih memilih bekerja di kota atau merantau ke luar daerah seperti Batam, Jawa, Bali dan Makasar. Ada pula yang ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Baru pada masa kini mulai disadarkan kembali bagi para pelajar tingkat Sekolah

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengamatan awal disaksikan, bahwa penenun (pekerja) di bawah umur dan masih sekolah itu dipaksa bekerja untuk bisa melunasi uang sekolah atau membeli seragam dan peralatan tulis, sehingga kadang fisik menjadi lemah, karena kurang asupan bahan makan dan gizi. Hal ini pun bisa menurunkan kualitas produk kain.

C. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa kompetensi penenun pada Sentra Tenun Ikat Gunung Mako, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL), Kabupaten Alor, NTT kurang meningkat?
2. Bagaimana strategi peningkatan kompetensi penenun pada Setra Tenun Ikat Gunung Mako, Desa Alor Besar, Kabupaten Alor, NTT?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah:

1. Menganalisis factor-faktor penyebab kurang meningkatnya kompetensi penenun pada Sentra Tenun Ikat Gunung Mako, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL), Kabupaten Alor, Provinsi NTT.
2. Menyusun strategi yang tepat bagi peningkatan kompetensi penenun di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako, Desa Alor Besar, Kecamatan ABAL, Kabupaten Alor, NTT.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis (Akademik)

- a. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Kajian Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penenun dan strategi peningkatan kompetensi penenun.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang mengkaji tentang kompetensi penenun dalam mendukung pembangunan industri tenun (*textile*).
- c. Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi materi pembelajaran bagi dunia industri, pendidikan, sejarah, budaya, ekonomi dan pariwisata.

2. Manfaat Praktis (Aplikatif)

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi para penenun di Kabupaten Alor pada umumnya dan Penenun Ikat di Kecamatan Alor Barat Laut khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan Sektor Industri, terutama industri tenun di Kabupaten Alor.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA) Kabupaten Alor sebagai bahan sosialisasi dan membuka pemahaman bagi para anggotanya.
- d. Penelitian ini juga bisa menjadi masukan bagi instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten Alor dan Provinsi NTT dalam pengembangan tenun dan pengambilan kebijakan di Bidang Industri Kerajinan Tenun.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pemangku kepentingan (*Stake Holders*) dalam hal ini Pihak Swasta (LSM, Bank, Koperasi, Dekranasda dan Kelompok Tenun).

